Strategi Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah: Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu

Alannuwari¹, Rahma Masdar², Muhammad Din³, Betty⁴

^{1,2,3,4} Public Sector Accounting, Economics and Tadulako
University e-mail: nalan8379@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini mencerminkan peran krusial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola keuangan daerah, menekankan perlunya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus pada implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPKAD Kota Palu. Subjek penelitian melibatkan pejabat dan staf bidang akuntansi di BPKAD, dengan objek penelitian mencakup proses pelaporan keuangan, penerapan SAP, dan pelatihan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP telah membawa dampak positif pada transparansi, keakuratan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPKAD Kota Palu. Pelatihan SDM juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf di bidang akuntansi dan keuangan. Sinergi antara SAP dan pelatihan SDM menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator keberhasilan, namun tantangan SDM, terutama perubahan bendahara, masih menjadi fokus utama untuk diperbaiki. Kesimpulan studi ini menggarisbawahi bahwa integrasi strategi SAP dan pelatihan SDM efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja di BPKAD Kota Palu. Sementara pencapaian positif telah terlihat, tantangan SDM tetap menjadi area perbaikan yang perlu perhatian lebih lanjut untuk mencapai kesinambungan dan peningkatan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Instansi, Keuangan, Kinerja*

Abstract

The background to this research reflects the crucial role of Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in managing regional finances, emphasizing the need to improve the quality of financial reporting and performance accountability. The research method used is descriptive qualitative with a focus on the implementation of Government Accounting Standards (SAP) and Human Resources (HR) training at BPKAD Palu City. The research subjects involved accounting officers and staff at BPKAD, with research objects including the financial reporting process, SAP implementation, and HR training. The research results show that the implementation of SAP has had a positive impact on the transparency, accuracy and timeliness of financial reporting at BPKAD Palu City. HR training also plays an important role in improving staff knowledge and skills in accounting and finance. The synergy between SAP and HR training creates an environment that supports improving the quality of financial reporting and performance accountability. The "Unqualified" (WTP) opinion from the Financial Audit Agency (BPK) is an indicator of success, but HR challenges, especially changing the treasurer, are still the main focus for improvement. The conclusion of this study highlights that the integration of SAP strategies and HR training is effective in improving the quality of financial reporting and performance accountability at BPKAD Palu City. While positive achievements have been seen, HR challenges remain an area of improvement that requires further attention to achieve sustainability and continuous improvement in the future.

Keywords: *Accountability, Agency, Finance, Performance*

PENDAHULUAN

Pentingnya kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menjadi sorotan utama dalam konteks tata kelola keuangan publik. Bukan hanya sebagai alat untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga sebagai landasan bagi pengambilan keputusan yang efektif dan transparan. Dalam menghadapi tuntutan akan profesionalisme dan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu sebagai lembaga pengelola keuangan di tingkat daerah merangkul Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai kerangka kerja yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kerjanya. Menurut Soedarmo (2020), SAP merupakan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan di sektor publik, karena SAP memberi pedoman yang jelas dalam pengelolaan keuangan negara. Mardiasmo (2018) juga menegaskan bahwa implementasi SAP yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan menjadi dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan. SAP membantu mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang pada akhirnya mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki sejauh mana implementasi SAP di BPKAD Kota Palu memengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan panduan yang disusun untuk menormatifikasikan praktik akuntansi di sektor publik. Implementasi SAP di BPKAD Kota Palu menjadi fokus utama penelitian ini, mengingat dampaknya yang potensial terhadap transparansi, keakuratan, dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana SAP telah diterapkan di BPKAD Kota Palu dan mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks pelaporan keuangan. Pemahaman mendalam tentang tingkat adopsi SAP dan evaluasi efektivitasnya menjadi kunci untuk menilai sejauh mana standar ini dapat menjadi landasan yang solid bagi BPKAD Kota Palu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah secara lebih baik.

Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan dampak pelatihan sumber daya manusia (SDM) terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi staf di BPKAD dalam mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah daerah. Haryanto (2021) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat memengaruhi keberhasilan implementasi SAP. Meskipun standar telah ditetapkan, tanpa pelatihan yang cukup bagi SDM, penerapan SAP tidak akan optimal. Sutrisno (2019) menambahkan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah dapat meningkatkan pemahaman staf tentang prinsip akuntansi, serta meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Kemampuan SDM menjadi elemen krusial dalam penerapan SAP, karena kesuksesan sebuah sistem tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada pemahaman dan keterampilan individu yang terlibat dalam prosesnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang sejauh mana pelatihan SDM di BPKAD Kota Palu dapat meningkatkan kemampuan staf dalam mengelola informasi keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana kombinasi penerapan SAP dan pelatihan SDM berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Kurniawan (2019) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi di sektor publik. Penerapan SAP yang transparan memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi keuangan yang akurat. Nasution (2020) juga menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memperbaiki citra pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Integrasi antara penggunaan SAP dan peningkatan keterampilan SDM diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal keberlanjutan pelaporan keuangan yang berkualitas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar gambaran komprehensif mengenai sejauh mana

implementasi SAP dan pelatihan SDM di BPKAD Kota Palu berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP, pelatihan SDM, dan dampaknya terhadap transparansi dan akurasi pelaporan keuangan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan praktik tata kelola keuangan publik yang lebih baik di tingkat daerah. Wahyu (2021) menjelaskan bahwa kombinasi penerapan SAP yang benar dengan pengembangan kapasitas SDM di pemerintahan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pelatihan yang dilakukan secara rutin akan memperbarui pengetahuan dan keterampilan para pegawai, memungkinkan mereka untuk tetap mengikuti perubahan peraturan yang berlaku dan menjaga ketepatan pelaporan. Sementara itu, Bastian (2017) mengungkapkan bahwa partisipasi aktif SDM dalam pelatihan akan meningkatkan keterampilan mereka, dan pada akhirnya dapat berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Salah satu konsep utama dalam strategi ini adalah penerapan Standar Akuntansi yang relevan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk entitas pemerintah daerah. Penerapan standar-standar ini tidak hanya memastikan bahwa entitas mengikuti prosedur akuntansi yang baku, tetapi juga memungkinkan penyajian informasi keuangan yang konsisten dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Harryanto & Irwanto, 2017). Selain itu, strategi ini mencakup pengembangan sistem kontrol internal yang kuat untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Raharja et al., (2018), strategi peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Fokus utama dari strategi ini adalah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja yang jelas dan terukur, memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi dapat dinilai dengan akurat. Penerapan indikator kinerja yang relevan dan sistem pemantauan yang efektif menjadi bagian integral dari strategi ini. Selain itu, strategi ini juga melibatkan pelibatan pemangku kepentingan, termasuk pihak internal dan eksternal, untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan pertanggungjawaban (Raharja et al., 2018). Dengan merumuskan dan mengimplementasikan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja, organisasi dapat memperkuat kontrol internal, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memberikan informasi yang lebih dapat dipercaya kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait.

Kualitas Pelaporan Keuangan

Subiyanto et al., (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan mencerminkan tingkat akurasi, relevansi, keandalan, dan transparansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas. Aspek akurasi menuntut bahwa informasi yang disampaikan mencerminkan dengan tepat posisi keuangan dan kinerja entitas. Relevansi mengacu pada kemampuan informasi tersebut untuk memberikan pemahaman yang baik kepada pemakai laporan dalam mengambil keputusan. Keandalan menekankan pada tingkat kepercayaan dan ketepatan waktu informasi yang disajikan. Transparansi mengarah pada kemampuan laporan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dengan baik situasi finansial dan operasional entitas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman secara rinci terkait suatu

fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini sangat relevan karena bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pemahaman praktisi keuangan daerah terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peningkatan akuntabilitas kinerja di BPKAD Kota Palu.

Untuk menggali informasi yang mendalam, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat tinggi dan staf di bidang Akuntansi dan Keuangan di BPKAD Kota Palu. Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik yang efektif untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan terbuka mengenai topik yang diteliti, seperti yang dijelaskan oleh Patton (2015) bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif subjektif dari informan, yang sangat berguna untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Subjek penelitian terdiri dari pejabat dan staf Bidang Akuntansi, yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terkait proses pelaporan keuangan di BPKAD Kota Palu. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAP, serta langkah-langkah yang diambil oleh BPKAD untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Objek penelitian mencakup proses dan sistem pelaporan keuangan, sistem pelaporan keuangan, strategi yang diterapkan oleh BPKAD untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan mekanisme akuntabilitas kinerja di BPKAD Kota Palu. Sistem pelaporan keuangan yang diterapkan di BPKAD Kota Palu menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), penerapan sistem pelaporan keuangan yang baik akan membantu mencegah adanya penyalahgunaan anggaran serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan dengan mendalam, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para pelaku utama di bidang tersebut terkait dengan penerapan SAP, serta tantangan yang mereka hadapi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Dengan mewawancarai para pelaku utama di bidang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh BPKAD untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. Menurut Supriyanto (2020), pemahaman mendalam tentang proses pelaporan keuangan dapat membantu menemukan area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi sistem, kebijakan, maupun keterampilan sumber daya manusia. Hasil analisis data kualitatif diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas implementasi strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja di BPKAD Kota Palu, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017), hasil analisis kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang fenomena yang terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan yang lebih efektif dalam tata kelola keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti berbagai aspek terkait akuntansi dan pengelolaan keuangan publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu. Sebagai seorang responden yang menempati posisi di seksi akuntansi, fokus utama pekerjaan mencakup penatausahaan, penatausahaan belanja, dan akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi bagian integral dari tanggung jawab, terutama terkait pelaporan dana transfer pusat dan daerah, dengan sub-divisi seperti Belanja Bantuan Hibah (BBH) provinsi dan BBH pusat. Pentingnya pengalaman dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan publik juga disoroti dalam penelitian ini. Responden mencatat bahwa mayoritas pejabat di posisi bendahara lebih memiliki pengalaman dalam manajemen daripada akuntansi. Faktor latar belakang sosial dan ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam memahami dan menerapkan konsep akuntansi di lingkungan instansi tersebut.

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, BPKAD Kota Palu telah mengadopsi pendekatan berbasis akrual. Ini melibatkan pencatatan langsung pada saat peristiwa terjadi,

termasuk piutang, aset, entitas, dan pendapatan. Transparansi dalam pembukuan, seperti pencatatan langsung transaksi seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada hari terjadinya, adalah contoh konkret dari implementasi standar ini. Perubahan signifikan dalam sistem informasi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) mencerminkan upaya BPKAD Kota Palu untuk memastikan penerapan SAP yang efektif. Sosialisasi kepada bendahara melalui berbagai bentuk, seperti bimbingan teknis (bimtek) dan pertemuan, dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan pemahaman dan adaptasi yang lancar terhadap perubahan tersebut.

Dalam hal dampak penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan, terlihat bahwa pendekatan akrual menciptakan pencatatan yang lebih terstruktur dan terukur. Contoh konkretnya adalah dalam manajemen persediaan, di mana stock opname dilakukan dengan lebih sistematis, menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan berkesinambungan. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) menjadi strategi yang diterapkan oleh BPKAD Kota Palu untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf, terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan. Responden menyatakan bahwa dampak dari pelatihan tersebut sangat signifikan, meskipun tanpa rincian yang mendalam.

Kontribusi dari kombinasi penerapan SAP dan pelatihan SDM diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Indikator keberhasilan, seperti opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta monitoring laporan keuangan setiap bulan dengan zona warna, menunjukkan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Tantangan utama dihadapi BPKAD Kota Palu dalam peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Perubahan bendahara yang sering terjadi dan kurangnya minat orang untuk menjadi bendahara menciptakan hambatan dalam kontinuitas informasi dan pengetahuan.

Saran untuk peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja mencakup perlunya pelatihan yang lebih intensif, seperti BIMTEK atau pertemuan reguler untuk berbagi informasi. Dengan demikian, proses pendidikan dan pemahaman diharapkan akan menjadi lebih berkesinambungan, terutama terkait dengan perubahan bendahara. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang langkah-langkah dan tantangan yang dihadapi BPKAD Kota Palu dalam mengoptimalkan akuntansi dan pengelolaan keuangan publiknya.

Pembahasan

Strategi yang pertama kali dibahas dalam studi ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP diintegrasikan dalam BPKAD Kota Palu sebagai landasan untuk pencatatan akuntansi berbasis akrual. Konsep ini memastikan bahwa semua peristiwa keuangan dicatat pada saat terjadinya, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Penerapan SAP menjadi kunci untuk menghadapi tuntutan kompleksitas perekonomian modern dan standar akuntansi yang semakin berkembang. Pemahaman yang mendalam mengenai SAP memberikan fondasi yang kuat bagi BPKAD Kota Palu untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan norma-norma dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, studi ini juga menyoroti peran penting pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf di bidang akuntansi dan keuangan. Pelatihan ini dilakukan melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi yang melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri dan kantor pajak. Dampak positif dari pelatihan ini terlihat dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf, yang menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan keuangan yang berkualitas. Namun, tantangan SDM seperti perubahan bendahara dan kurangnya minat menjadi bendahara juga diakui sebagai kendala. Oleh karena itu, perlu ada upaya lanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk strategi kaderisasi dan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan kebijakan dan sistem yang diterapkan.

Hasil wawancara juga menyoroti dampak positif kombinasi penerapan SAP dan pelatihan SDM terhadap transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Keterpaduan antara sistem

yang terkini dan sumber daya manusia yang terampil menciptakan sinergi yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas laporan keuangan. SAP yang menerapkan prinsip akrual dan pelatihan yang terfokus pada pemahaman konsep ini membantu staf dalam mengelola dengan lebih baik, meminimalkan kesalahan, dan menghasilkan laporan yang lebih dapat diandalkan.

SIMPULAN

Dengan menerapkan strategi yang terintegrasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu telah berhasil meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dalam konteks pemerintahan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan dasar yang kokoh untuk pencatatan akuntansi berbasis akrual, memastikan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) juga memberikan dampak positif dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf, walaupun tantangan perubahan bendahara dan kurangnya minat menjadi bendahara tetap menjadi perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2013). Analisis Manajemen Aset Tetap Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(3), 390-413.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150-159.
- Hamruna, I., Muhammad, Z., & Thaher, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(10), 739-745.
- Harryanto, H., & Irwanto, A. K. (2017). Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1).
- Hartono, L. B., Affandi, A., & Suwanda, D. (2023). Strategi Pengelolaan Modal Kerja untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD BLUD di Wilayah Purwasuka Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1477-1489.
- Mangar, J., Mingkid, E., & Kawung, E. (2021). Manajemen Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(100).
- Pratiwi, E. T., Mahmuda, D., & Malik, E. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 241-251.
- Raharja, E. L., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2).
- Subiyanto, B., Ghozali, I., & Darsono. (2021). Empirical Study of the Relationship between Managerial Accounting Discretion and Innate Factors with the Quality of Financial Reporting. *A.S.B.L Degres*, 1983, 59–73.
- Supriadi, A., Haryani, S., & Nurhardiyanto, I. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(11), 1478-1485.
- Widayanti, I. (2023). Laporan Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kota Temanggung Jawa Tengah). *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(1), 1-13.